



Volume : 1

Nomor : 1

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BARU SUNGAI MEDANG KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

AWAL KHAIRI, S.Sos., M.A.P
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
Email: Awalkhairi@gmail.com

ABSTRACT

This study took place in the village of Baru Sungai Medang East Warm Water District Kerinci. Objective To determine the Improvement of Public Participation in the Construction of New Village in Sungai Medang East Warm Water District. The approach used in this study is qualitative. The Informant Research numbering as many as eight people. Techniques and Data Collection Tools in this study were interviews, observation and documentation. Tools Data Collection Form a list of questions, a pen, a book / paper, tape recorder. Analysis of individual government units are under construction in the village of Baru Sungai Medang East Warm Water District Kerinci. Results showed Increased Public Participation in New Village In development Medang River East Warm Water District Kerinci district has been running optimally. In carrying development already well underway, but there is increase the participation of the communities associated with the financing is not just a funding from the government but also non-governmental, it shows a form part of public participation in the process of development or awareness that in a development requires adequate funding and society in contributing not for the insistence of the government or other parties but for their consciousness to develop their regions. Where the rural village of Baru Sungai Medang East Warm Water District Kerinci development have ups and downs there needs to be improvement in the work program of the villag head and the village of Baru Sungai Medang.

Keywords: Increased Participation of Civil Society in development

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun Informan Penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik dan Alat Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat Pengumpulan Data Berupa daftar pertanyaan, pena, buku/kertas. Unit Analisis adalah individu pemerintah dalam pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Hasil Penelitian menunjukkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci sudah berjalan secara maksimal. Dalam menjalankan pembangunan sudah berjalan dengan baik, namun ada Peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan pembiayaan bukan hanya sekedar dana dari pemerintah tetapi juga swadaya masyarakat, hal tersebut menunjukkan suatu bentuk bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ataupun kesadaran masyarakat bahwa dalam suatu pembangunan membutuhkan dana yang

cukup, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya. Dimana di desa Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci pembangunan mengalami pasang surut perlu ada perbaikan dalam program kerja kepala desa dengan perangkat di Desa Baru Sungai Medang.

Kata kunci : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara mental atau moral dengan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui demokratisasi masyarakat. Demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih deka, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa. Dalam lingkungan dimana budaya demokratisasi masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersipat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat. Semakin melembaganya demokratisasi dalam masyarakat desa dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola desa secara mandiri. Konsep demokratisasi yang dimaksud disini adalah partisipasi langsung oleh masyarakat dengan mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang sempit dan statis, sekedar menempatkan kemampuan masyarakat desa untuk membiayai pembangunan.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Setiap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing, namun demikian tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Sehubungan dengan itu baik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, perbenturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah, koordinasi antara kegiatan aparatur pemerintah harus dilaksanakan.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam pembangunan Desa / Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka. Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif.

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam suatu organisasi pemimpin haruslah mampu menggerakkan dan memotivasi anggotanya untuk dapat bekerja secara profesional, karena dengan kemampuan tersebut dapat mendorong anggotanya bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam mewujudkan kedisiplinan kerja. Kartono (2005:76).

Seorang pemimpin tidak bisa semata-mata mengandalkan otoritasnya berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku saja, hal ini menimbulkan rasa tidak rela dan ikhlas pada diri bawahan walaupun secara fisik mereka tetap bekerja tetapi akan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan berdasarkan standar kerja yang sudah ditetapkan dalam efisiensi kerja suatu organisasi. Oleh karena itu seorang pemimpin dalam suatu organisasi memerlukan hal yang disebut *Personal Power* yang mampu membangkitkan semangat kerja dan menciptakan kedisiplinan pada bawahannya, sehingga setiap bawahan akan selalu berusaha menggerakkan seluruh kemampuannya kepada standar kompetensi yang sesuai syarat-syarat secara formal yang dikeluarkan pemerintah. Handoko (2000 :24)

Dalam mengatasi masalah-masalah, tentu harus ada kecepatan, pikir pemimpin cerdas, walaupun agak sedikit ketinggalan. Akan tetapi pemimpin dapat memberi dan menambah integritas, inovasi, selalu mencapai sasaran, dan kerja sama tim. Untuk itu seorang pemimpin harus memulai sesuatu dengan nilai yang menjadi dasar organisasi, karena nilai merupakan sesuatu yang berharga, baik dalam individu atau kelompok. Selain itu masyarakat bergantung pada nilai-nilai tertentu, seperti kejujuran, kerja sama yang baik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan mengarah kepada penilaian yang baik pula.

Jika nilai telah menjadi fondasi organisasi, maka misi menjadi sesuatu yang penting, agar sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan memiliki standar dan kualitas yang sesuai dan juga baik. Karena seorang pemimpin harus memiliki strategi, tujuan dan standar, untuk suatu pencapaian tertentu, maka pemimpin juga harus dapat menjadi suri tauladan dan dapat menjalin komunikasi yang baik.

Berdasarkan pengamatan awal dapat penulis simpulkan sementara mengenai keadaan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur karena dalam perencanaan pembangunan memerlukan kerja extra, seperti pembenahan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, pembangunan infrastruktur serta pembenahan sumber daya manusia dan pembangunan lainnya. Disamping itu terdapat permasalahan yang serius menurut pandangan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat terutama masalah pembangunan desa, dikarenakan dalam bertindak biasanya kepala desa mengambil keputusan sendiri.
2. Kurangnya keterlibatan warga masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa yang diindikasikan karena kurangnya keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Tidak adanya pemerataan dalam pembangunan dalam infrastruktur
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan desa karena tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat desa.

Hal ini disebabkan kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan sosial antar masyarakat, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis bagi peneliti yaitu hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang di landasi konsep ilmiah khususnya ilmu administrasi negara.

2. Manfaat Akademik

Yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian Administrasi

Menurut Siagian (2008:89) Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Dari sudut *etimologis* menurut kamus besar bahasa Indonesia perkataan administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) yang menurut sejarahnya berasal dari bahasa Latin yaitu *Ad-* dan *ministrare* yang berarti *To Serve*, melayani atau mengabdikan. Herbert A. Simon dalam Athoillah (2010:132) administrasi adalah suatu kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Dalam pengertian sempit administrasi berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (*office work*) seperti : tulis menulis, pengetikan surat menyurat (termasuk menggunakan komputer), agenda, kearsipan, pembukuan dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Siagian (2008:91) ada beberapa unsur dalam administrasi yaitu :

1. Adanya tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu.
2. Tujuan itu dapat dicapai atau diperoleh melalui kegiatan orang lain, dengan demikian ada atasan dan bawahan.
3. Karena kegiatan itu melalui bantuan orang lain, maka perlu diadakan bimbingan dan pengawasan.

Istilah administrasi Negara di terjemahkan dari "*public Administration*". Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. Jika istilah *public Administration* itu di uraikan secara *etimologis*, maka "Publik" berasal dari bahasa Latin "*poplicus*" atau "*People*" dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. "*Administration*" juga berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata "*ad*" artinya intensif dan "*ministrare*" artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Dimock dalam Sahya anggara (2012:134) dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk, yang satu sama lain bergantung pada materi dan tujuan, pereturan strategi, rencana, budget, instruksi, perintah dan sebagainya. Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Menurut George J. Gordon dalam Syafiie (2003:33). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang di butuhkan untuk menjalankan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus di lihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peranan daya manusia sangat menentukan.

Menurut Sedarmayanti (1996 : 124) Sumber daya manusia adalah untuk mempertahankan mereka agar tetap mau bersama organisasi dan memelihara sikap kerja sama serta kemampuan kerja para pegawai tersebut. Sedangkan menurut Mangkuprawira (2003 : 51) Sumber daya manusia adalah sebagai unsur produksi yang unik di bandingkan dengan unsur produksi lainnya

Menurut Hasibuan (2005:244) Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang di miliki individu. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Sumber daya manusia merupakan tempat keluarnya potensi yang dapat di kembangkan untuk proses produksi dalam suatu organisasi.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

1.5.3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Sastropetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

Menurut Isbandi (2007: 27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, sukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.

1.5.3.1. Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan di antara :

1. Partisipasi uang
Partisipasi uang merupakan bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda
Partisipasi harta benda merupakan partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga
Partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan
Partisipasi keterampilan merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian dorongan melalui kemampuan atau keterampilan yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Partisipasi buah pikiran
Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa gagasan atau ide untuk menyusun program maupun untuk melancarkan pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna untuk mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
6. Partisipasi sosial
Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang tumbuh dari diri seorang masyarakat secara sadar.
7. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terlebih dahulu ikut serta dalam musyawarah atau diskusi.
8. Partisipasi representatif
Partisipasi representatif merupakan partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada seseorang untuk duduk dalam organisasi.

Menurut Ndraha (1988:34) memberikan pemaparan bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti mengiyakan, menerima dan menolakan
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Adapun faktor -faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi di antara :

1. Usia.

Faktor usia merupakan yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada, mereka yang kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan

moral kepada nilai norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin.

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagi bangsa mengarahkan bahwa pada dasarnya tempat perempuan “didapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peranan perempuan tersebut telah bergeser dengan gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan.

Merupakan syarat yang mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, karena pendidikan diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan.

Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Dengan adanya pekerjaan dan penghasilan yang baik selain dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

5. Lamanya tinggal.

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal pada lingkungan tertentu, maka cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

1.5.3.3. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu : (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (*equal*). Perbedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat : (1) Mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, (2) Mampu menentukan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (3) Dapat berperan dalam perencanaan masa depan mereka sendiri dalam masyarakatnya tanpa menyerahkannya kepada ahli atau kelompok berkuasa, (4) Dapat menghimpun sumber-sumber daya di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama, (5) Dapat memperoleh pengalaman dalam menyatakan, menganalisa situasi dan mengidentifikasi strategi yang tepat

dan realistis untuk suatu kehidupan yang baik, (6) Karenanya anggota masyarakat menjadi tokoh individual yang dapat bekerja atas dasar persamaan, (7) Desa dan masyarakat akan menyelesaikan tugas dan proyek swadaya, karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari luar, yang juga akan menjadi dasar menuju kemandirian, dan (8) Dalam proses ini akan dibangun hubungan yang erat dan integratif diantara anggota masyarakat.

1.5.4. Konsep Pembangunan

Siagian dalam Pranoto (2011:12) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Kartasasmita (2000:23) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Dari definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktifitas.
2. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit dalam Suryono (2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

1.5.5. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

1.5.5.1. Pengertian Desa

Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh nomor 6 tahun 2015 pasal 1 ayat 6 pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa, lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat dan untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

1.5.5.2. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Daerah Kota, Kabupaten nomor 6 tahun 2015 pasal 1 ayat 7 pengertian Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya peraturan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sedangkan terhadap desa diluar, desa geologis yaitu desa yang bersifat administratif, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri, dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta hibah dari sumbangan pihak ketiga.

1.5.5.3. Aparat Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerinh desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan Perangkat Desa.

1.5.5.4. Konsep Pembangunan Desa

Secara *etimologi*, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Menurut Siagian (1988:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Tujuan utama pembangunan desa, menurut Ndraha (1981:84), adalah: Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. (a) Pemerintah berhasil membangun berbagai fasilitas kehidupan masyarakat sebagai modal dan sarana penggerak masyarakat desa. (b) Pemerintah berhasil menggerakkan masyarakat (mobilisasi) dengan berbagai cara dan sarana seperti simulasi, perlombaan desa, penetapan-penetapan target dan mungkin melalui instruksi-instruksi. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa, yang dimulai dari bobot yang rendah (partisipasi fisik) atau hanya beberapa orang saja yang tergerak kemudian meningkat sampai kepada bobotnya yang tertinggi (partisipasi bertanggungjawab), dimana setiap orang merasa tergerak untuk berpartisipasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan hidup dalam suasana sejahtera dengan lingkungannya. Konteks peningkatan taraf hidup masyarakat lebih nyata apabila masyarakat desa telah memperoleh taraf hidup yang layak, dalam arti kebutuhan pokoknya (*primary needs*) bisa terpenuhi, mereka dapat menikinati kebutuhan pangan, sandang, dan papas serta pendidikan dan pelayanan kesehatan.

1.5.5.5. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan dan Desa Kabupaten secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ;

1. Desa

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa mempunyai tugas memimpin desa dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris desa, mempunyai tugas membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup desa.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

4. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

5. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan secara khusus ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 maupun dalam keputusan menteri dalam negeri (kep.Mendagri) nomor 63 dan 64 tahun 2009 bahwa pemerintah merupakan ujung tombak bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kewenangan:

1. Menggali berbagai potensi yang dimiliki potensi desa dan kelurahan untuk tujuan pembangunan.
2. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat desa dan kelurahan
4. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan kewenangan tersebut di atas pemerintah desa dan kelurahan dibantu oleh lembaga kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan, kelembagaan tersebut membantu dalam bidang:

1. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat yang diemban oleh lembaga adat (Pasal 43-44 Kepmendagri No. 64 tahun 2009 tentang pedoman umum mengenai desa).
2. Lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas-tugas pembangunan pemerintah desa yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan (pasal 45-47 Kepmendagri tahun 2009).

Pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu menyangkut :

1. Potensi sumber daya alam (SDA) pada umumnya dapat dikatakan adalah relatif cukup, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya (SDM) masih lemah.
2. Prasarana dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian (misalnya sumber daya air, jaringan irigasi, jalan desa dan lainnya) masih perlu pembenahan.
3. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang telah banyak terbentuk di daerah pedesaan ternyata belum berfungsi secara optimal.
4. Beberapa kelemahan dan keterbatasan lainnya misalnya akses pemasaran hasil pedesaan masih sangat lemah dan terbatas.
5. Akses petani kepada kredit (sumber daya modal) untuk pengembangan usaha perekonomian pedesaan masih relatif terbatas.

1.5.6. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Sukmawati (2008:77) ada lima bentuk partisipasi di antaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi prakarsa atau inisiatif

- Merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan prakarsa masyarakat, menyarankan strategi pemberdayaan terus menerus, terarah dan terencana dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan prakarsanya.
2. Partisipasi pembiayaan
Merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah.
 3. Partisipasi pengambilan keputusan
Merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disasar adalah memperkuat posisi modal sosial yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan.
 4. Partisipasi mobilitas tenaga
Merupakan bentuk partisipasi dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk memobilisasi tenaga.
 5. Partisipasi pelaksanaan pembangunan
Merupakan bentuk partisipasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ini.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial. Satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Dalam penelitian ini peneliti memilih informan secara purposive (sengaja) yang sesuai dengan kriteria di atas, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian ini. Orang tersebut merupakan orang-orang yang sangat memahami bagiannya masing-masing dan terlibat langsung didalam proses pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Dalam penelitian ini unit analisis adalah lembaga pemerintah dalam pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Partisipasi prakarsa atau inisiatif

Indikator Partisipasi prakarsa atau inisiatif adalah meningkatkan peran masyarakat atau suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi". Prakarsa atau inisiatif partisipasi berarti meningkatkan peran masyarakat untuk ikut terlibat dalam musyawarah atau kegiatan dalam masyarakat dimana masyarakat perlu diberikan kepercayaan yang lebih dalam pembangunan.

Partisipasi prakarsa atau inisiatif, sudah berjalan sesuai dengan rencana namun ada yang belum terlaksanakan akan di kerjakan pada pembangunan yang akan datang. Penyelenggaraan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur,

masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat memberikan informasi dan saran untuk peningkatan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur.

2. Indikator Partisipasi Pembiayaan

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi pembiayaan baik berupa uang maupun barang dan yang lainnya sudah berjalan dengan baik yang mana masyarakat memiliki partisipasi dalam pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

3. Indikator Partisipasi Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pembuatan keputusan bermakna bagi perkembangan individu dan bagi upaya fungsionalisasi diri, proses membangun keterampilan kelompok dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Barangkali, nilai yang paling besar dari keikutsertaan dalam pengambilan keputusan adalah kekuatan pengertian yang disampaikan kepada individu. Peserta membutuhkan respek dari orang lain dalam rangka aktualisasi dirinya. Adapun tujuan partisipasi sesungguhnya adalah untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian serta turut menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan “keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi dan menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pimpinan dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan bersama sehingga tidak terjadi kesalah fahaman antara pimpinan dengan anggota maupun dengan masyarakat khususnya di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

4. Indikator Partisipasi Mobilitas Tenaga

Pada hakikatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada Masyarakat. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan, perubahan atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah dan Masyarakat sesuai dengan pokok-pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi Masyarakat.

Mobililitas tenaga kerja seyogyanya dianalisis sebagai mata rantai dalam proses perubahan sebagai faktor penentu (peubah pengaruh) atau sebagai akibat (peubah terpengaruh). Sesungguhnya, mobilitas tenaga kerja dapat dipandang sebagai bagian integral dan kondisi yang penting sekali dari proses perubahan sosial dan perkembangan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, mobilitas tenaga kerja dan perubahan sosial atau

perkembangan ekonomi itu, sebaiknya diperlakukan sebagai suatu rangkaian proses yang saling mempengaruhi, di mana perubahan-perubahan yang diakibatkan mobilitas tenaga kerja dapat merangsang perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat merangsang mobilitas tenaga kerja lebih lanjut, dan seterusnya. Hubungan antara mobilitas tenaga kerja dan kegiatan-kegiatan pembangunan pedesaan adalah kompleks dan saling mempengaruhi.

Partisipasi Mobilitas Tenaga pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. pembangunan sudah terlaksana dengan baik namun keaktifan kepala desa merupakan wujud dari tercapainya tujuan pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

5. Indikator Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan

Sebagaimana dengan terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan berarti pembangunan desa akan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kriteria: 1) mengikutsertakan semua anggota masyarakat (rakyat) dalam setiap tahap pembangunan; kriteria ini mengharapkan setiap anggota masyarakat harus dan kesempatan berusaha sesuai, 2) setiap anggota masyarakat dengan pengorbanannya; berarti yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan, 3) adanya tenggang rasa di antara anggota masyarakat yang berarti bahwa mendapatkan kesempatan bekerja bidang dan kemampuan masing-masing; harus mendapatkan imbalan sesuai selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam rasa kebersamaan yang saling menguntungkan. Dengan demikian adanya kontrol pembangunan merupakan kondisi tercapainya pembangunan yang berlanjut tersebut.

Partisipasi pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik, namun pembangunan desa tidak hanya terlepas pada pembangunan fisik saja, akan tetapi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bahwa pembangunan desa itu harus mencakup segala aspek kehidupan masyarakat desa baik itu kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, maupun sumber daya manusianya. Penyelenggaraan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembangunan baik yang sudah berjalan maupun untuk masa yang akan datang.

Dalam pengambilan keputusan sebaiknya keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama dimana partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan.

IV. SIMPULAN

Partisipasi Prakarsa atau Inisiatif, sudah berjalan sesuai dengan rencana namun ada yang belum terlaksanakan akan di kerjakan pada pembangunan yang akan datang. Penyelenggaraan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat

memberikan informasi dan saran untuk peningkatan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur.

Partisipasi Pembiayaan, bentuk partisipasi pembiayaan baik berupa uang maupun barang dan yang lainnya sudah berjalan dengan baik yang mana masyarakat memiliki partisipasi dalam pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi dan menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pimpinan dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan bersama sehingga tidak terjadi kesalah fahaman antara pimpinan dengan anggota maupun dengan masyarakat khususnya di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Partisipasi Mobilitas Tenaga pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. pembangunan sudah terlaksana dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi supaya lebih baik dan perlu adanya keaktifan kepala desa merupakan wujud dari tercapainya tujuan pembangunan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan, pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya terlepas pada pembangunan fisik saja, akan tetapi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bahwa pembangunan desa itu harus mencakup segala aspek kehidupan masyarakat desa baik itu kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, maupun sumber daya manusianya. Penyelenggaraan pembangunan di desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembangunan baik yang sudah berjalan maupun untuk masa yang akan datang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kemurahan-Nya, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul ” Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”. Ucapan terimakasih Penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anton Athoillah. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia

Handoko. T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEE.

Hasibuan, Melayu, SP. 2000. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara



Volume : 1

Nomor : 1

- _____. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2008, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi Daerah : upaya Membangun.
- Sedarmayanti. 1996. *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi Daerah : upaya Membangun
- Siagian. Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003, Metode Penelitian Bisnis, CV. Haji Mas Agung : Jakarta.
- Taliziduhu Ndhara. 2000. Ilmu Pemerintahan II. Jakarta: BKU IIP.
- Tim STIA NUSA. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA NUSA), Sungai Penuh.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik